

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data panel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2015–2023 menggunakan pendekatan Panel *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) dengan metode *Pooled Mean Group Estimator*, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia selama periode 2015–2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, terutama saat terjadi krisis pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021. Meskipun demikian, tren jangka panjang menunjukkan kecenderungan penurunan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan signifikan selama pandemi, namun mulai menunjukkan pemulihan pasca-2021. Upah minimum provinsi (UMP) terus mengalami peningkatan secara nominal tiap tahun, meskipun daya serapnya terhadap tenaga kerja tidak merata antarwilayah. Investasi menunjukkan tren meningkat secara bertahap, namun masih terkonsentrasi pada provinsi tertentu. Sementara itu, tingkat pendidikan rata-rata penduduk meningkat, yang tercermin dari naiknya proporsi penduduk berpendidikan menengah dan tinggi, terutama di wilayah perkotaan.
2. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka dalam jangka pendek dan jangka panjang. Namun, arah pengaruhnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini mengindikasikan adanya fenomena *jobless growth*, yang mencerminkan bahwa pencapaian pertumbuhan tidak selalu disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang inklusif.
3. Upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, kenaikan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini mendukung

pendekatan teori upah efisiensi, di mana kenaikan upah dapat mendorong produktivitas dan memperkuat daya beli masyarakat, sehingga menciptakan permintaan agregat yang lebih tinggi dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, dampaknya sangat bergantung pada struktur sektor usaha di masing-masing provinsi dan tingkat kesiapan tenaga kerja.

4. Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, peningkatan investasi justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kenaikan pengangguran terbuka. Temuan ini bertolak belakang dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa investasi mendorong penciptaan lapangan kerja melalui efek pengganda. Dalam konteks Indonesia, hasil ini dapat dijelaskan oleh dominasi investasi pada sektor padat modal dan belum optimalnya penyesuaian antara jenis investasi dan struktur tenaga kerja lokal. Selain itu, ketimpangan distribusi investasi antarwilayah juga menyebabkan manfaatnya tidak tersebar secara merata dan justru memperbesar kesenjangan antarprovinsi.
5. Pendidikan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan dalam jangka pendek, namun positif dan signifikan dalam jangka panjang terhadap pengangguran terbuka. Dalam jangka pendek, peningkatan pendidikan membantu menurunkan pengangguran karena meningkatkan keterampilan dasar dan peluang akses terhadap pekerjaan. Namun dalam jangka panjang, tingginya ekspektasi lulusan terhadap kualitas pekerjaan dan terbatasnya lapangan kerja yang sesuai justru menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka dari kelompok terdidik. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, dan menegaskan pentingnya penerapan prinsip teori *human capital* yang menekankan hubungan antara kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja.

5.2. Implikasi

5.2.1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan literatur ekonomi ketenagakerjaan, khususnya terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, investasi, dan pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Pertama, hasil yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran terbuka dalam jangka panjang menantang asumsi klasik Okun's Law dan mendukung argumen mengenai jobless growth di negara berkembang, sebagaimana dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2020). Ini menegaskan pentingnya meninjau ulang model pertumbuhan makroekonomi yang selama ini dianggap otomatis menurunkan pengangguran.

Kedua, temuan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran dalam jangka panjang memberikan dukungan terhadap teori upah efisiensi, yang menyatakan bahwa kenaikan upah dapat mendorong produktivitas tenaga kerja dan menciptakan dinamika pasar tenaga kerja yang lebih sehat. Temuan ini juga memperluas pemahaman tentang dampak upah minimum dalam konteks negara berkembang dengan struktur pasar tenaga kerja dualistik.

Ketiga, pengaruh positif investasi terhadap pengangguran terbuka dalam jangka panjang menunjukkan bahwa tidak semua investasi bersifat pro-labor, dan menantang klaim teoritis dari pendekatan Keynesian bahwa investasi selalu berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan teoritis yang lebih kontekstual dan sektoral dalam menganalisis hubungan antara investasi dan ketenagakerjaan.

Keempat, dinamika pengaruh pendidikan yang awalnya menurunkan pengangguran tetapi dalam jangka panjang justru menaikannya memperkuat pentingnya teori human capital dalam kerangka pasar tenaga kerja modern. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa akumulasi modal manusia perlu didukung oleh transformasi struktural dan

kebijakan pasar kerja yang adaptif, agar keunggulan kompetitif lulusan pendidikan tidak berubah menjadi pengangguran terdidik.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan teori-teori ketenagakerjaan melalui konteks empiris Indonesia yang khas dan kompleks, serta membuka ruang bagi pengembangan model hibrida yang menggabungkan pendekatan struktural dan institusional dalam analisis pengangguran terbuka.

5.2.2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi praktis yang relevan bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan, pengembangan investasi, dan penyusunan kebijakan pendidikan di Indonesia. Pertama, hasil yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justru berdampak positif terhadap peningkatan pengangguran terbuka dalam jangka panjang mengindikasikan bahwa arah pertumbuhan yang selama ini berlangsung belum inklusif secara ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalihkan fokus dari pertumbuhan berbasis output semata ke arah pertumbuhan yang inklusif, dengan mendorong sektor-sektor padat karya seperti manufaktur ringan, pertanian modern, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan fiskal dan insentif investasi juga perlu disesuaikan untuk mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi.

Kedua, temuan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap pengangguran dalam jangka panjang menunjukkan pentingnya peran kebijakan pengupahan dalam menciptakan stabilitas pasar tenaga kerja. Pemerintah pusat maupun daerah sebaiknya tidak hanya menetapkan upah minimum berdasarkan formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja serta kondisi sektor usaha. Skema pengupahan sektoral atau insentif tambahan untuk perusahaan yang menyerap tenaga kerja lokal dapat menjadi alternatif kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah.

Ketiga, hasil bahwa investasi justru meningkatkan pengangguran terbuka dalam jangka panjang menunjukkan perlunya reposisi arah kebijakan investasi nasional. Pemerintah perlu lebih selektif dalam mengarahkan investasi pada sektor yang mampu menyeimbangkan efisiensi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pemberian insentif fiskal sebaiknya diprioritaskan untuk proyek-proyek yang mempekerjakan tenaga kerja lokal dan memberikan transfer keterampilan, bukan hanya berorientasi pada profitabilitas jangka pendek.

Keempat, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Meskipun pendidikan dalam jangka pendek mampu menurunkan pengangguran terbuka, dalam jangka panjang pendidikan justru meningkatkan pengangguran jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) melalui penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan pasar, pengembangan program vokasi, serta pelatihan kerja yang berorientasi pada praktik dan keterampilan teknis. Selain itu, program tracer study dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja perlu ditingkatkan guna mengurangi mismatch antara kompetensi lulusan dan kebutuhan sektor riil.

Akhirnya, koordinasi antarinstansi pemerintah menjadi sangat penting agar kebijakan di bidang pertumbuhan ekonomi, pengupahan, investasi, dan pendidikan tidak berjalan secara sektoral, tetapi terintegrasi dalam kerangka pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan. Dengan implementasi kebijakan yang responsif dan berbasis bukti, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, upah minimum, investasi, dan pendidikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan meningkatkan kualitas pasar tenaga kerja di Indonesia.

5.3.Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan implikasi teoritis maupun praktis yang telah dibahas, maka beberapa rekomendasi kebijakan dan akademik yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah pusat maupun daerah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperkuat sektor padat karya seperti manufaktur ringan, agribisnis, dan ekonomi kreatif. Selain itu, kebijakan upah minimum sebaiknya disesuaikan dengan produktivitas serta kondisi ekonomi daerah agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi dunia usaha. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan memperkuat kerja sama lintas sektor dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan berbasis bukti (*evidence-based planning*).

2. Bagi Dunia Usaha

Pelaku usaha diharapkan mampu bersinergi dengan kebijakan pemerintah terkait upah dan investasi, serta berperan aktif dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Dunia usaha dapat berkontribusi melalui penyediaan program pelatihan, magang, maupun peningkatan teknologi yang selaras dengan produktivitas tenaga kerja, sehingga tercipta lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan perlu menyesuaikan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Penguatan pendidikan vokasi, kurikulum berbasis kompetensi, serta perluasan program magang industri menjadi langkah penting untuk mengurangi *mismatch* kompetensi. Dengan demikian, lulusan pendidikan lebih siap memasuki dunia kerja dan berkontribusi dalam menekan angka pengangguran terbuka.

4. Bagi Peneliti

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi

pengangguran terbuka, seperti digitalisasi, struktur industri, regulasi ketenagakerjaan, maupun mobilitas tenaga kerja antarwilayah. Selain itu, pendekatan spasial atau penggunaan data mikro juga dapat memperkaya analisis sehingga hasil penelitian lebih komprehensif dan kontekstual.